



KONFLIK HORIZONTAL DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI DI KELURAHAN CAKRA UTARA KOTA MATARAM)

HORIZONTAL CONFLICT AND EFFORTS TO OVERCOME IT (STUDY IN NORTH CAKRA VILLAGE, MATARAM CITY)

Ivan Natsir

Universitas mataram

Email : ivannatsir@unram.ac.id

Abstract

This study aims to determine what factors cause horizontal conflicts in Cakranegara Utara Village, Cakranegara District, Mataram City, West Nusa Tenggara Province, and how the resolution efforts made by related parties (Government, Police, and Society) in preventing and managing conflict. The method used in this study is the empirical method. Conflicts occur due to the existence of mechanical solidarity in the community which causes mutual solidarity and facilitates difficulties in communal conflicts in society. Conflicts that occur are often due to the late handling of triggers/triggers provided by the police apparatus because of the services provided by the normative apparatus, there is no good communication between village officials and the TNI (babin), in preventive measures. Conflicts occur because of other social, economic, cultural, and historical factors, all of which are interrelated, either because of the weak social order that exists in society because of genetics (heredity) or because of the negative stigma attached to past crimes.

Keywords: *Conflict; Management; North Cakranegara Residents*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya konflik horizontal di Kelurahan Cakranegara Utara Kecamatan Cakranegara Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta bagaimanakah upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak terkait (Pemerintah, Kepolisian dan Masyarakat) dalam mencegah dan mengelola konflik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empirik. Konflik yang terjadi dikarenakan adanya suatu solidaritas mekanis masyarakat yang menyebabkan adanya solidaritas kolektif yg sempit sehingga mempermudah pecahnya konflik komunal di tengah-tengah masyarakat. Konflik yang terjadi seringkali karena penanganan pemicu/trigger yang terlambat diantisipasi oleh aparat kepolisian karena terpaku oleh mekansime normatif, tidak adanya kerjasama dan komunikasi yang baik dengan aparat Pemerintah Desa dan TNI (babinsa), dlm tindakan preventif. Konflik terjadi karena faktor lain baik sosial, ekonomi, budaya, dan sejarah yang kesemuanya saling kait mengkait baik karena lemahnya tatanan sosial yang ada ditengah masyarakat atau karena genitas (keturunan) atau karena stigma negatif yang melekat karena kriminalitas masa lalu.

Kata Kunci : *Konflik; Penanggulangan; Warga Cakranegara Utara*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan daerah rawan terhadap berbagai bencana, baik disebabkan oleh alam maupun manusia. Berbagai bencana tersebut antara lain; gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan, kerusakan/konflik sosial, dll. Di antara berbagai bencana tersebut konflik sosial merupakan salah

satu persoalan serius yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Berbagai konflik sosial yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun terakhir telah membawa kerugian yang cukup besar baik kerugian materiil maupun hilangnya nyawa ratusan bahkan ribuan manusia.

Nusa Tenggara Barat merupakan daerah rawan terhadap berbagai bencana, baik disebabkan oleh alam maupun manusia. Berbagai bencana tersebut antara lain: gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan, kerusakan/konflik sosial, dll. Di antara berbagai bencana tersebut konflik sosial merupakan salah satu persoalan serius yang dihadapi. Berbagai konflik sosial yang terjadi telah membawa kerugian yang cukup besar baik kerugian harta, maupun hilangnya nyawa manusia.

Konflik pada dasarnya adalah ciri dinamika masyarakat, untuk memperoleh keadaan yang lebih baik. Konflik terjadi mulai dari yang ringan dan tersembunyi hingga tingkat yang berat dan terbuka. Konflik diartikan sebagai bentuk pertentangan antara satu dengan pihak lainnya. Konflik juga diartikan sebagai perjuangan nilai dan tuntutan atas status, kekuasaan, dan sumber daya yang bersifat langka dengan maksud menetralkan, mencederai atau menyalahkan lawan. Konflik merupakan proses kearah upaya memperoleh penghargaan dengan cara menghilangkan dan memperlemah persaingannya.

Secara geografis Nusa Tenggara Barat terletak pada posisi strategis, dengan luas wilayah 20.153,15 km² yang terdiri dari Pulau Lombok seluas 4.738,70 km² dan Pulau Sumbawa 15.414,45 km². Sejumlah alasan NTB berada pada posisi strategis yaitu : *pertama* NTB berada pada jalur lintas transnasional Banda Aceh-Kupang yang secara ekonomis menguntungkan. *Kedua*, NTB terapat oleh dua alur pelayaran internasional alur pelayaran Selat Lombok dan alur pelayaran Selat Timor. *Ketiga*, persis berada pada lintasan tujuan wisata utama dunia Bali-Komodo dan Tana Toraja yang sering juga disebut “segi tiga emas pariwisata Indonesia”.

Secara administrasi Pemerintahan, Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari 8 (delapan) Kabupaten dan 2 (dua) kota, dengan jumlah penduduk 5,398.577 juta jiwa lebih menurut dirjen kemendagri (kependudukan dan catatan sipil) RI. Nusa Tenggara Barat memiliki kekayaan sumberdaya alam yang cukup potensial, yaitu berupa lahan pertanian dan peternakan dan telah ditetapkan sebagai lumbung padi dan daerah pengembangan ternak. Di samping itu, juga memiliki kekayaan hutan, flora dan fauna, mineral, pertambangan emas dan tembaga, industri dan sumber daya kelautan yang cukup luas.

Setiap orang dipastikan tidak akan dapat terhindar dari situasi konflik, entah konflik yang berkaitan dengan dirinya, dengan orang lain, atau dengan siapapun. Konflik bisa terjadi pada setiap orang, dimana saja dan kapan saja. Untuk memahami konflik, sangat tergantung pada kemampuan setiap orang untuk mempelajari kadar konflik bagi dirinya, keluarga, dan masyarakat.

Konflik dapat dipahami dari beberapa gejala antara lain:

- a. Adanya perselisihan yang tidak terselesaikan antara dua pihak atau lebih.
- b. Terjadinya perentangan antara kedua belah pihak atau lebih, pertentangan dapat terjadi pada diri individu, antar individu, individu dengan kelompok, antar kelompok, kelompok dengan masyarakat, dan antar masyarakat.

c. Tawuran antar kelompok, antar daerah tertentu dan sikap mau menang sendiri dan menganggap bahwa kelompok lain sebagai sebuah ancaman, dan berbagai gejala lainnya.

Konflik pada dasarnya adalah ciri dinamika masyarakatnya, untuk memperoleh keadaan yang lebih baik. Konflik terjadinya mulai dari yang ringan dan tersembunyi hingga tingkat yang berat dan terbuka. Konflik diartikan sebagai bentuk pertentangan antara satu dengan pihak lainnya. Konflik juga diartikan sebagai perjuangan nilai dan tuntutan atas status, kekuasaan, dan sumber daya yang bersifat langka dengan maksud menetralkan, mencederai atau menyalahkan lawan. Konflik merupakan proses kearah upaya memperoleh penghargaan dengan cara menghilangkan dan memperlemah pesaingnya.

Konflik dapat berupa konflik usaha, huru hara, terror, SARA, politik, konflik Pusat-daerah. Konflik dapat terjadi secara vertical dan atau horizontal. Konflik vertical terjadi pada lingkungan masyarakat yang memiliki status sosial, ekonomi, dan politik yang berbeda secara berjenjang, misalnya konflik kelas. Konflik horinzontal terjadi pada lingkungan masyarakat yang memiliki status social, ekonomi, dan politik yang sederajat misalnya konflik antar kampung, antar tetangga, antar pelajar, antar preman, dll.

Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu propinsi di Indonesia dengan tingkat konflik yang cukup tinggi. Konflik yang terjadipun sangat variatif mulai dari persoalan agama, etnis, suku, pengelolaan sumber daya ekonomi maupun politik. Data di Polda NTB menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2020 sampai dengan Pebruari 2021 tercatat terjadi 79 kali konflik komunal yang terjadi di Nusa Tenggara Barat. Kabupaten Lombok Barat berada dalam posisi teratas dengan 24 kali konflik, menyusul Lombok tengah 20 kali, Bima 14 kali, Lombok Timur 9 Kali, Mataram 8 Kali, Sumbawa 3 kali dan Dompu 1 kali. Berbagai konflik komunal yang terjadi tersebut berupa perkelahian antar warga sebanyak 49 kasus dan kekerasan massa berupa pengrusakan sebanyak 30 kasus.

Konflik horizontal di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya di Kelurahan Cakranegara Utara kecamatan Cakranegara tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, karena membawa nama agama berbahaya bagi keutuhan bangsa dan Negara dalam menjamin ketahanan nasional. Berbagai upaya sebenarnya telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah, kepolisian maupun pihak-pihak lainnya namun kebanyakan upaya tersebut lebih terfokus pada penanganan pasca konflik sehingga seringkali akar masalah dari konflik tersebut tidak pernah terselesaikan. Berbagai penelitian juga telah dilakukan namun kajian yang dilakukan cenderung parsial oleh karena itu perlu penelitian yang berfokus pada akar permasalahan dan upaya pencegahannya secara mendasar. Yang menjadi isu hukumnya adalah mengapa terjadi konflik horizontal, dan bagaimana dampak penegakan hukum pidana sebagai upaya penyelesaian konflik yang efektif di masa mendatang.

Salah satu Konflik horizontal antara Dusun Tohpati dengna Dusun Karang Mas-mas Kelurahan Cakranegara Utara, Kota Mataram dan faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya konflik horizontal yang menimbulkan korban jiwa 2 orang dan kerukakan fasilitas lainnya.

Kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, berbagai upaya sebenarnya telah dilaksanakan baik oleh pemerintah daerah, kepolisian maupun pihak-pihak lainnya namun kebanyakan upaya tersebut lebih terfokus pada penanganan pasca konflik sehingga seringkali akar masalah dari konflik tersebut tidak pernah terselesaikan.

Berbagai penelitian juga telah dilakukan namun kajian yang dilakukan cenderung parsial-parsial baik itu dengan sudut pandang/keilmuan tertentu atau satu wilayah tertentu. Untuk itu diperlukan suatu kajian yang lebih komprehensif dengan sudut pandang atau keilmuan yang berbeda-beda. Berangkat dari pemaparan di atas maka penelitian ini dilakukan dengan melihat factor-faktor penyebab terjadinya konflik horizontal dan upaya penanggulangannya.

Berdasarkan pemaparan di atas maka dirumuskan masalah yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu, mencari faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik Horizontal di Kelurahan Cakranegara Utara Kecamatan Cakranegara Kota Mataram Povinsi Nusa Tenggara Barat?, dan bagaimanakah upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak terkait (Pemerintah, Kepolisian dan Masyarakat) dalam mencegah dan mengelola konflik? Sehingga nantinya ditemukan faktor-faktor penyebab terjadinya suatu konflik horizontal dan untuk merumuskan upaya pencegahan dan pengelolaan konflik horizontal secara komprehensif yang dilakukan semua pihak terutama masyarakat yang sedang berkonflik di kelurahan Cakranegara Utara Kecamatan Cakranegara Kota Mataram tersebut.

Jenis penelitian adalah penelitian empiris atau penelitian kualitatif yaitu penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan gambar. Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi. Studi etnografi (*ethnographic studies*) mendeskripsikan dan menginterpretasikan budaya, kelompok sosial atau sistem. Meskipun makna budaya itu sangat luas, tetapi studi etnografi biasanya dipusatkan pada pola-pola kegiatan, bahasa, kepercayaan, ritual dan cara-cara hidup.

PEMBAHASAN

Setiap orang dipastikan tidak akan dapat terhindar dari situasi konflik, entah konflik yang berkaitan dengan dirinya, dengan orang lain, atau dengan siapapun. Konflik bisa terjadi pada setiap orang, dimana saja dan kapan saja. Untuk memahami konflik, sangat tergantung pada kemampuan setiap orang untuk mempelajari kadar konflik bagi dirinya, keluarga, dan masyarakat. Konflik dapat dipahami dari beberapa gejala antara lain:

1. Adanya perselisihan yang tidak terselesaikan antara dua pihak atau lebih.
2. Terjadinya perentangan antara kedua belah pihak atau lebih, pertentangan dapat terjadi pada diri individu, antar individu, individu dengan kelompok, antar kelompok, kelompok dengan masyarakat, dan antar masyarakat.
3. Tawuran antar kelompok, antar daerah tertentu dan sikap mau menang sendiri dan menganggap bahwa kelompok lain sebagai ancaman, dan berbagai gejala lainnya.

Konflik pada dasarnya adalah ciri dinamika masyarakatnya, untuk memperoleh keadaan yang lebih baik. Konflik terjadinya mulai dari yang ringan dan tersembunyi hingga tingkat yang berat dan terbuka. Konflik diartikan sebagai bentuk pertentangan antara satu dengan pihak lainnya. Konflik juga diartikan sebagai perjuangan nilai dan tuntutan atas status, kekuasaan, dan sumber daya yang bersifat langka dengan maksud menetralkan, mencederai atau melenyapkan lawan. Konflik merupakan proses kearah upaya memperoleh penghargaan dengan cara menghilangkan dan memperlemah pesaingnya.

Konflik dapat berupa konflik usaha, huru hara, terror, SARA, politik, konflik Pusat-daerah. Konflik dapat terjadi secara vertical dan atau horizontal. Konflik vertical terjadi

pada lingkungan masyarakat yang memiliki status social, ekonomi, dan politik yang berbeda secara berjenjang, misalnya konflik kelas. Konflik horinsantal terjadi pada lingkungan masyarakat yang memiliki status social, ekonomi, dan politik yang sederajat misalnya konflik antar kampung, antar tetangga, antar pelajar, antar preman, dll.

Konflik atau *conflictus* secara etimologis berasal dari bahasa Latin “con” yang berarti bersama dan “fligere” yang berarti benturan atau tabrakan¹ merupakan perwujudan dan atau pelaksanaan beraneka pertentangan antara dua pihak yang dapat merupakan dua orang bahkan golongan besar seperti negara.² Konflik adalah gejala-gejala sosial yang ada dalam setiap masyarakat. Konflik melekat dengan masyarakat, dimana konflik itu selalu ada selama masyarakat itu ada sehingga tidaklah mungkin menghapus konflik seperti yang menjadi angan-angan para diktator; sebaliknya tidaklah mungkin konsensus dipertahankan terus menerus sekalipun dengan cara-cara kekerasan yang juga merupakan keinginan para penguasa otoriter.

Konflik juga menunjukkan pada hubungan antara dua pihak atau lebih (individu/ kelompok) yang memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Definisi ini menunjukkan perbedaan yang jelas antara konflik dan kekerasan. Kekerasan meliputi tindakan, perkataan, sikap, berbagai struktur atau sistem yang menyebabkan kerusakan secara fisik, mental, sosial atau lingkungan, dan/atau menghalangi seseorang untuk meraih potensinya secara penuh.³

Dalam *International Encyclopedia of The Social Sciences* Vol. 3 diuraikan mengenai pengertian konflik dari aspek antropologi, yakni ditimbulkan sebagai akibat dari persaingan antara paling tidak dua pihak; di mana tiap- tiap pihak dapat berupa perorangan, keluarga, kelompok kekerabatan, satu komunitas, atau mungkin satu lapisan kelas sosial pendukung ideologi tertentu, satu organisasi politik, satu suku bangsa, atau satu pemeluk agama tertentu (Nader, t.t.) dengan demikian pihak-pihak yang dapat terlibat dalam konflik meliputi banyak macam bentuk dan ukurannya. Selain itu dapat pula dipahami bahwa pengertian konflik secara antropologis tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan secara bersama-sama dengan pengertian konflik menurut aspek-aspek lain yang semuanya itu turut ambil bagian dalam memunculkan konflik sosial dalam kehidupan kolektif manusia (Chang, 2001).

Kehidupan sosial itu, kalau dicermati komponen utamanya adalah interkasi antara para anggota. Sehubungan dengan interaksi antar anggota itu ditemukan berbagai tipe. Tipe-tipe interaksi sosial secara umum meliputi: *cooperative* (kerjasama), *competition* (persaingan) dan *conflict* (pertikaian). Dalam kehidupan sosial sehari-hari tampaknya selain diwarnai oleh kerjasama, senantiasa juga diwarnai oleh berbagai bentuk persaingan dan konflik. Bahkan dalam kehidupan sosial tidak pernah ditemukan seluruh warganya sepanjang masa kooperatif. Sehubungan dengan itu, yang menjadi pertanyaan dalam tulisan ini adalah “apakah konflik itu erat hubungannya dengan struktur sosial, dan apa fungsi konflik itu bagi kehidupan sosial manusia?”

Kondisi kehidupan sosial tertentu kalau dikaitkan dengan konflik, tentunya tidak sederhana, karena setiap konflik antaranggota dalam kehidupan sosial itu tidak selalu bentuk dan sifatnya sama (misalnya ada konflik individual atau kelompok,

1 Pringondigdo, A.G, (Red), *Ensiklopedia Umum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1973), hlm. 687. Lihat juga, Poerwodarminto, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1961), hlm. 461.

2 Yayasan Cipta Loka, *Ensiklopedia Populer Politik Pembangunan Pancasila*, (Jakarta: Yayasan Cipta Loka, 1984) hlm.63.

3 Lihat Simon Fisher, dkk. *Mengelola Konflik Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*, (Jakarta : British Council Indonesia, 2001).

konflik terpendam atau terbuka, dan lain-lain). Dengan demikian memang ada variasi dalam konflik, baik atas dasar bentuk, sifat, penyebab terjadinya, maupun langkah penyelesaiannya. Selanjutnya dapat pula dijelaskan bahwa dalam persoalan konflik ini perlu diperhatikan konteks struktur dan fungsi dalam kehidupan sosial yang bersangkutan. Tipe struktur dan fungsi kehidupan sosial tertentu sebagai suatu unit entitas akan berpengaruh terhadap konflik yang terjadi di situ

Peter M. Blau (1977) menyatakan bahwa struktur sosial adalah penyebaran secara kuantitatif warga komunitas di dalam berbagai posisi sosial yang berbeda yang mempengaruhi hubungan di antara mereka (termasuk di dalamnya hubungan konflik). Karakteristik pokok dari struktur yaitu adanya berbagai tingkat ketidaksamaan atau keberagaman antarbagian dan konsolidasi yang timbul dalam kehidupan bersama, sehingga mempengaruhi derajat hubungan antarbagian tersebut yang berupa dominasi, eksploitasi, konflik, persaingan, dan kerjasama. Selanjutnya Beliau mengelompokkan basis parameter pembedaan struktur menjadi dua, yaitu nominal dan gradual. Parameter nominal membagi komunitas menjadi sub-sub bagian atas dasar batas yang cukup jelas, seperti agama, ras, jenis kelamin, pekerjaan, marga, tempat kerja, tempat tinggal, afiliasi politik, bahasa, nasionalitas, dan sebagainya. Kalau dicermati, pengelompokan ini bersifat horisontal, dan akan melahirkan berbagai “golongan”. Adapun parameter gradual membagi komunitas ke dalam kelompok sosial atas dasar peringkat status yang menciptakan perbedaan kelas, seperti pendidikan, pendapatan, kekayaan, restise, kekuasaan, kewibawaan, inteligensia, dan sebagainya. Jadi pengelompokan ini bersifat vertikal, yang akan melahirkan berbagai “lapisan”.

Atas dasar struktur sosial yang dikemukakan Blau di atas, dapat disebutkan bahwa interaksi antarbagian dalam kehidupan bersama dapat terjadi antarkelompok, baik atas dasar parameter nominal maupun gradual; bahkan tidak hanya secara internal tetapi dapat juga secara eksternal. Interaksi antarbagian dalam kehidupan sosial, atas dasar parameter nominal atau gradual dapat menimbulkan konflik antarindividu anggota dari berbagai “golongan” dan “lapisan” tadi. Sementara itu, Menurut Dahrendorf (1986), konflik sosial mempunyai sumber struktural, yakni hubungan kekuasaan yang berlaku dalam struktur organisasi sosial. Dengan kata lain, konflik antar kelompok dapat dilihat dari sudut keabsahan hubungan kekuasaan yang ada atau dari sudut struktur sosial setempat (Dahrendorf, 1986; Simanjuntak, 1994).

Berdasar konsep Parsons (1951), setiap sistem sosial diperlukan persyaratan fungsional. Di antara persyaratan itu dijelaskan bahwa sistem sosial harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dan dengan tuntutan transformasi pada setiap kondisi tindakan warga (*adaptation*). Berikutnya, tindakan warga diarahkan untuk mencapai tujuan bersama (*goal attainment*). Kemudian persyaratan lain adalah bahwa dalam interaksi antarwarga setidaknya harus ada suatu tingkat solidaritas, agar struktur dan sistem sosial berfungsi (*integration*). Tampaknya apa yang dikemukakan Parsons itu cukup relevan untuk dipakai sebagai salah satu dasar dalam menganalisis secara struktural dan fungsional konflik lokal; dan atas dasar konsep Parsons ini pengetahuan.

mengenai konflik sosial akan lebih memadai. Sehubungan dengan itu Coser (t.t.) menyatakan bahwa konflik adalah suatu komponen penting dalam setiap interaksi sosial. Oleh karena itu menurut Coser (1974) konflik tidak perlu dihindari, sebab konflik tidak boleh dikatakan selalu tidak baik atau memecah belah atau merusak.

Dengan kata lain konflik dapat menyumbang banyak bagi kelestarian kehidupan sosial, bahkan mempererat hubungan antaranggota.

Berbicara tentang fungsi ternyata tidak hanya sekedar berkait dengan hal peran. Relasi fungsi tidak selalu terpadu (integratif) karena dapat saja relasi yang saling konflik, lebih-lebih kalau di dalamnya ada cukup banyak fraksi. Dalam fungsi terdapat struktur, dalam fakta sosial terdapat struktur dan fungsi yang saling terkait erat (kalau tanpa kaitan berarti bukan struktur). Teori fungsi tidak dirancang dalam kaitannya dengan perubahan, sehingga antara keduanya agak sulit untuk dikaitkan. Sering teori ini hanya terbatas menyangkut hubungan-hubungan yang serasi atau seimbang (equilibrium) saja, dan kurang mampu melihat potensi-potensi konflik yang mungkin ada (Brown, 1980). Pencampuran teori ini dengan teori perubahan baru muncul kemudian. Berbicara khusus tentang perubahan, umumnya menyangkut perilaku, inipun memerlukan waktu yang panjang.

Bronislaw Malinowski dalam membuat deskripsi etnografi, sedapat mungkin menerapkan teori fungsional, meskipun tidak semuanya berhasil. Menurutnya, manusia dalam memenuhi kebutuhan secara individual, tetapi melalui kehidupan bersama (sosial) secara terorganisasi atau tertata dalam hukum atau nilai-nilai tertentu. Sehubungan dengan itu, tujuan akhir yang akan mereka capai adalah kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama mengenai tujuan-tujuan ini akan dicapai atas dasar nilai-nilai umum yang berlaku. Semua ini menurut Malinowski disebut *charter*, yang diartikan sebagai suatu sistem yang terorganisasi tentang aktivitas-aktivitas sosial yang penuh tujuan (yang didasarkan atas nilai umum dan kesepakatan bersama). Sistem nilai dan tujuan bersama ini dapat diartikulasikan secara lebih kongkret menjadi norma. Prinsip-prinsip integrasi akan tercermin dalam institusi sosial, dan inilah *basic-needs* manusia. Prinsip-prinsip integrasi ini merupakan bagian dari *basic-needs* itu sendiri. Sementara itu responnya adalah kebudayaan yang diwujudkan dalam pembentukan institusi-institusi sosial. Kebudayaan sebagai respon *basic-needs* dapat diindikasikan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan, sehingga memuaskan *basic-needs*nya

Radcliffe Brown dengan pendekatan antropologi-sosialnya ternyata seperti metode yang diterapkan dalam ilmu alam atau fisika. Dengan pendekatan komparasi untuk memperoleh pemahaman tentang keseluruhan komunitas. Adapun hal yang dikomparasikan adalah struktur keseluruhan komunitas dan bukan bagian-bagian. Dalam hal ini sebenarnya Brown mengadopsi apa yang pernah dikerjakan oleh E. Durkheim, sebelum akhirnya berubah ke pendekatan analisis struktural. Fungsionalisme bagi Brown untuk membentuk suatu struktur sosial dalam konteks masa kini (tanpa menggunakan fakta historis, karena dianggap tidak terlalu berguna). Hal yang ditekankan adalah proses yang berkaitan dengan adaptasi pada masyarakat atau komunitas yang diteliti itu sendiri (Brown, 1980). Mengenai konsep "institusi" dikenal perbedaan pendekatan antara Brown dengan Malinowski. Brown menganggap komunitas sebagai keutuhan lebih berarti daripada sebagai bagian-bagian yang dikumpulkan. Sementara itu menurut Malinowski institusi terbentuk bukan karena *basic needs* komunitas, tetapi pemenuhan *basic-needs* individu; karena pemenuhan kebutuhan tidak mungkin dapat dipenuhi sendiri (jadi diperlukan keberadaan orang lain). Sehubungan perlunya keberadaan orang lain, Firth (1963) menyatakan: "*a human community is a body of people sharing in common activities and bound by multiple relationships in such a way that the aims of any individual can be achieved only by participation in action with others*"

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa Malinowski dan Brown mengajukan teori integrasi keseimbangan dan keharmonisan sosial, sedangkan konflik mengacu pertentangan dalam komunitas menuju perpecahan. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah kalau integrasi dan konflik (dua hal yang saling bertolak belakang) senantiasa ada dalam kehidupan sosial, lalu bagaimana keterkaitan antar keduanya, paling tidak apa fungsi konflik bagi kehidupan sosial yang bersangkutan.

Menurut van Baal (1988) konflik adalah produk kebudayaan, dan kebudayaan adalah produk dari struktur sosial. Logika hubungannya adalah menempatkan konflik sebagai produk dari struktur sosial. Melalui pengetahuan ada-tidaknya hubungan struktural dan fungsional dalam kehidupan sosial, akan memudahkan penyelesaian kasus konflik yang selalu atau akan selalu terjadi di dalamnya.

Fakta sosial menurut Emile Durkheim bukan sekedar apa yang dapat dilihat, tetapi juga apa yang ada di dalamnya yang tidak dapat dilihat. Semua gejala sosial seharusnya difahami sebagai hasil dari sikap dan perilaku manusia secara individual. Faktor sikap dan perilaku para individu ini yang menggambarkan keberadaan suatu kehidupan sosial. Fakta sosial (termasuk faktor kebudayaan di dalamnya) yang mengendalikan individu, dan bukan individu yang mengatur kehidupan sosial. Dalam hal ini fakta sosial terbentuk secara alami dan posisinya eksternal. Eksternal yang dimaksud di sini adalah dalam posisi sebagai pengendali pada diri individu dalam kehidupan bersama.

Konflik mempunyai dampak yang sangat besar bagi masyarakat karena konflik yang berlangsung terus menerus akan menjurus ke arah disintegrasi social, oleh karena itu salah satu persoalan utama antara masyarakat dan negara adalah masalah konflik yaitu usaha-usaha untuk mencari titik temu antara pihak yang berkonflik sehingga konsensus atau kesepakatan dapat tercapai.⁴ Sehingga dapat kita lihat bahwa konflik adalah pertentangan atau perbedaan antara dua orang atau lebih (kelompok) yang didasarkan pada perbedaan. Dalam memahami konflik, terdapat enam teori yang menyebabkan konflik.⁵

Pertama, Teori Hubungan Masyarakat, yang menganggap bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan diantara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat.

Kedua, Teori Negosiasi Prinsip. Teori ini menganggap bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik.

Ketiga, Teori Kebutuhan Manusia. Teori ini mengatakan bahwa konflik disebabkan oleh akar kebutuhan dasar manusia yang terdiri dari fisik, mental dan sosial yang tidak terpenuhi atau dihalangi.

Keempat, Teori Identitas. Teori ini berasumsi bahwa konflik terjadi karena adanya identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya suatu penderitaan masa lalu yang tidak diselesaikan.

Kelima, Kesalahpahaman Antar Budaya. Teori ini mengatakan bahwa konflik disebabkan oleh ketidakcocokan dalam cara-cara berkomunikasi diantara berbagai budaya yang berbeda.

4 Maswadi Rauf, *Konsensus Politik: Sebuah Penajajaran Teoritis*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2000). Hlm 1.

5 Hugo van der Merwe, *Conflict Theories*, Johannesburg, Afrika Selatan, 1997 dan dalam sebuah makalah Marck Roos, *Creating The Conditions For Peace Making: Theories of Practice in Ethnic Conflict Resolution*, Ethnic and Racial Studies, 2000. dalam Simon Fisher, *Mengelola Konflik Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*. (Jakarta: Penerbit The British Council, 2001).

Keenam, Teori Transformasi Konflik. Teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah-masalah sosial, budaya dan ekonomi.

Berbagai konflik yang terjadi tersebut membawa kerugian yang tidaklah sedikit. Secara langsung kerugian berupa kerusakan fisik, aset, harta dan benda bahkan nyawa. Selain itu secara tidak langsung berbagai konflik yang terjadi juga mempengaruhi perekonomian masyarakat dan negara, tidak sedikit wisatawan dan investor yang berniat berinvestasi di kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat mengurungkan niatnya karena alasan tidak adanya jaminan keamanan.

Di dalam upaya penanggulangan kejahatan termasuk konflik horizontal di Kelurahan Cakranegara Utara Kota Mataram perlu diperhatikan berdasarkan teori tentang kebijakan Karangiminal dan kebijakan hukum pidana. Menurut Sudarto bahwa kebijakan Karangiminal dapat kaji dalam arti :⁶

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi, dan;
- c. Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan bahan-bahan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Sarana Penal adalah sarana yang diterapkan aturan Hukum Pidana dalam rangka penanggulangan kejahatan dan sarana Non penal adalah sarana-sarana di luar aturan Hukum Pidana yang juga dalam rangka penanggulangan kejahatan termasuk konflik horizontal di Kelurahan Cakranegara Utara Kota Mataram. Tinggal persoalannya adalah pada saat kapan salah satu dari keduanya atau kedua-duanya dipergunakan, bahwa tujuan pembangunan hukum adalah menciptakan keadilan sosial dalam arti luas.

Sedangkan Menurut Barda Nawawi Arief :

*“Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan tersebut pada hakikatnya merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (Social Policy) yang menuju pada perlindungan sosial (Social Defence) dan kesejahteraan sosial (Social Welfare)”*⁷. Pembangunan nasional (national development) di bidang hukum yang merupakan kebijakan sosial memiliki tujuan yang tidak sekedar agar aturan hukum itu diterapkan setiap kali dijumpai kasus atau perkara melainkan ingin mencapai kesejahteraan dan perlindungan sosial. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut maka dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yang disebut upaya penal dan upaya non penal.

Penegakan Hukum Pidana dalam rangka menuju cita-cita pembangunan hukum, yang sesuai dengan Indonesia sebagai Negara berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*) tidak bisa diartikan sempit apa adanya dalam penjelasan itu, sehingga segala kekuasaan Negara harus diatur oleh hukum dan prikehidupan masyarakat sangat terkait dengan aturan permainan hukum itu (*rule of Law*).

Di dalam mengkaji permasalahan konflik horizontal dapat difahami sebagai salah satu bentuk kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) yang

⁶ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai, Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm 1.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung : Citra Aditya Bakti, Bakti 1996) hlm.2.

pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social welfare*) oleh karena itu dapat dikatakan bahwa, tujuan utama dari politik criminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat⁸.

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

- 1). Sarana penal atau dengan penerapan hukum pidana (*criminal law application practical criminology*), dan
- 2). Sarana non penal yakni dengan kebijakan non penal (bukan hukum pidana) yang mencakup penanganan yang bersifat Karangiminogen yaitu mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan dengan menggunakan sarana media massadan upaya pencegahan kejahatan tanpa menggunakan hukum pidana⁹ (*influencing views of society on crime and punishment prevention without punishment*).

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “non-penal” (bukan/di luar hukum pidana).

Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitik beratkan pada sifat “repressive” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non penal” lebih menitikberatkan pada sifat “preventive” (pencegahan/peningkatan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

Penanggulangan non penal inilah salah satu yang dipergunakan oleh Pemerintah dan masyarakat kelurahan Cakranegara Utara Kecamatan Cakranegara di dalam menanggulangi konflik horizontal yang didukung oleh perguruan tinggi sebagai mediatornya, sehingga masyarakat tersebut dapat hidup rukun dan damai.

A. Gambaran Umum Kota Mataram.

1. Letak geografis Kota Mataram.

Mataram sebagai salah satu Kota dan sekaligus ibu Kota Propinsi Nusa Tenggara Barat, letaknya diapit antara kabupaten Lombok Barat dan Selat Lombok. Letaknya antara 08° 33’ dan 08° 38’ Lintang Selatan dan antara 116° 04’ - 116° 10’ Bujur Timur.

Wilayah kota Mataram dengan luasnya adalah 6,130 Km², yang terbagi dalam 6 kecamatan. Kecamatan terluas adalah Selaparang yaitu sebesar 17,653 Km², disusul Kecamatan Mataram dengan luas wilayah 10,7647 Km². Sedangkan wilayah terkecil adalah Kecamatan Ampenan dengan luas 9,4600 Km². Berdasar Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2007, Tentang Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan di Kota Mataram maka kecamatan yang sebelumnya berjumlah 3 (tiga) kecamatan dimekarkan menjadi 6 (enam) dengan 50 (limapuluh) kelurahan dan 298 lingkungan.

2. Kependudukan dan Perekonomian

Berdasarkan data yang ada di BPS tahun 2022, jumlah penduduk kota Mataram tercatat 371.045. Jumlah penduduk perempuan lebih besar dibandingkan jumlah penduduk laki-laki, ditunjukkan oleh rasio jenis kelamin (rasio jumlah penduduk laki-laki terhadap jumlah penduduk perempuan), sebesar 98 persen. Penduduk kota

⁸ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.* hlm 11.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.* hlm. 42.

Mataram belum menyebar secara merata di seluruh wilayah Mataram. Umumnya, penduduk banyak menumpuk/bertempat tinggal di kecamatan Ampenan, karena Ampenan adalah merupakan kota tua di kota Mataram. Secara rata-rata, kepadatan penduduk Mataram tercatat sebesar 6.638 jiwa setiap kilometer persegi, dan wilayah terpadat yaitu kecamatan Ampenan yang memiliki tingkat kepadatan 8.412 orang setiap kilometer persegi

Tingkat kemiskinan masyarakat Kota Mataram menurut Data BPS tahun 2022 dari jumlah penduduk Kota Mataram 406.910 jiwa bahwa jumlah masyarakat miskin Kota Mataram sebanyak 49.633 (11,8 %). Memperhatikan jumlah penduduk miskin dibandingkan dengan tingkat pendidikan masyarakat kota Mataram, maka perlu ada upaya dari pemerintah untuk melakukan pemberdayaan masyarakat miskin untuk dapat meningkatkan lapangan pekerjaan yang dapat mendorong kinerja masyarakat miskin agar dapat meningkatkan pendapatan mengurangi pengangguran sekaligus mengurangi terjadinya kesenjangan sosial dan mengurangi tingkat konflik horizontal.

Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Mataram 2011
 Population Density By District In Mataram City 2011

Kecamatan <i>District</i>	Luas Daerah (Km) <i>Local Area</i>	Jumlah Penduduk <i>Population</i>	Kepadatan (km ²) <i>Population Density</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Ampenan	9.46	79,367	8,39
Sekarbela	10.32	53,946	5,22
Mataram	10.76	73,921	6,87
Selaparang	10.77	73,222	6,79
Cakranegara	9.67	64,771	6,69
Sandubaya	10.32	61,683	5,97
Jumlah	61.30	406,910	6,63
2010	61.30	402,843	6,57

Tingkat kemiskinan dikota Mataram berdasarkan dat Badan Pusat Statistis tahun 2022, bahwa dari jumlah penduduk Kota Mataram adalah 406.910 jiwa, sedangkan jumlah masyarakat miskin Kota Mataram sejumlah/sebanyak 49.633 orang atau 11,8 % dari jumlah penduduk kota Mataram.

B. Profil Kelurahan Cakranegara Utara Kecamatan Cakranegara Kota Mataram Sebagai Berikut :

I. Keadaan Umum Wilayah Kelurahan

- A. Luas wilayah Kelurahan : 103,475 Ha
 - Dataran..... : 103,475 Ha
- B. Jumlah penduduk Keseluruhan : 5.270
 - Laki-laki : 2.619
 - Perempuan : 2.651
- C. Jumlah Kepala Keluarga (KK) : 1.412
- D. Batas wilayah
 - Sebelah Utara : Kel. Sayang-sayang
 - Sebelah Selatan : Kel. Mayura
 - Sebelah Barat : Kel. Karang Taliwang

- Sebelah Timur : Kel. Selagalas

E. Kondisi Geografis

- Tinggi tempat dari permukaan laut : 25 - 50 m
- Curah hujan rata-rata per tahun : 1600 3000 mm
- Keadaan suhu rata-rata : 25 ° s/d 30 ° C

KEPENDUDUKAN KELURAHAN CAKRANEGARA UTARA

Penduduk berdasarkan kewarganegaraan

1. Warga Negara Indonesia, laki-laki 2.589, perempuan 2.630, dan tidak ada warga keturunan.

2. Penduduk berdasarkan mata pencaharian.

1. Pertanian dan peternakan	: 128
2. PNS	: 96
3. TNI/Polri	: 14
4. Pedagang	: 112
5. Penjahit	: 8
6. Tukang batu	: 61
7. Tukang kayu	: 69
8. Pengusaha	: 9
9. Nelayan	: -
10. Montir	: 5
11. Dokter	: 1
12. Sopir	: 56
13. Usaha jasa	: 231
14. Lain-lainnya	: 723
Jumlah	: 1.513

Jumlah penduduk berdasarkan agama dan Pendidikan yaitu : Islam : 1.494, Hindu : 3.693, Katolik : 32, Buda 51 orang sehingga jumlahnya 5.272 orang. Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan pendidikan meliputi : belum sekolah 748 orang, tidak tamat sekolah dasar/ sederajat : 425 orang, tamat SD. 578 orang, tamat SMP/ sederajat : 641, dan tamat SMA/ sederajat : 2.475 orang, tamat akademi/D1-D2. 147, sarjana 259 orang sehingga jumlahnya adalah 5272 orang.

Jumlah Penduduk Kota Mataram 406.910 jiwa dengan luas wilayah 61,30 km². Data ini memberikan pengertian berimplikasi pada tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi yang akan berdampak pada: Akses lapangan pekerjaan, Pengangguran kaum intelektual yang semakin tinggi dan pengangguran pada umumnya, apabila hal ini tidak diupayakan pengurangan pengangguran dengan membuka lapangan pekerjaan baru, maka akan member dampak negative kepada kondisi sosial masyarakat yang pada akhirnya akan memicu terjadinya konflik horizontal.

Melihat Kerawanan Kriminalitas dan konflik horizontal di dalam wilayah Kota Mataram yang terjadi sebagai berikut :

1. Kejahatan konvensional antara lain pencurian ringan, pencurian berat/ kekerasan dan pencurian sepeda motor, (curat, curas, curanmor)
2. Kejahatan transnasional meliputi: narkoba, terorisme, imigran, cyber crime, pencucian uang (*money laundring*)
3. Kejahatan yang merugikan kekayaan negara, antara lain : korupsi, imigrasi, uang palsu.

4. Kejahatan yang berimplikasi kontingens antara lain : sara, rusuh massa, unjuk rasa secara anarkis,
5. Konflik horizontal dalam pemilihan kepala lingkungan.

C. Konflik yang pernah terjadi sebagai konflik horizontal di Kota Mataram di luar kelurahan Cakra Utara meliputi :

1. Perkelahian antara kampung yang merupakan konflik horizontal seperti :
Konflik horizontal antar lingkungan Shindu dengan lingkungan taliwang kecamatan Cakranegara serta Konflik horizontal antara lingkungan/kampung shindu dengan lingkungan nyangget Cakranegara dan lingkungan Karang jasi dengan lingkungan Karang Tapen kota Mataram.
2. Konflik horizontal yang bernuansa sara, yaitu konflik horizontal antara lingkungan Shindu (beragama Hindu) seperti Nyangget, Karang Bangket, Karang Tatah, Karang Mas-Mas, Taliwang beragama (Islam) dan konflik antara lingkungan Karang Jasi beragama Hindu dengan lingkungan Karang Tapen beragama Islam serta konflik antar lingkungan Sekarbela beragama Islam dengan lingkungan Pagesangan beragama Hindu.
Konflik horizontal di Kota Mataram.
 - a. Kampung Lekok Kelurahan Mayura Kec. Cakranegara (25 Juni 2013). Latar belakangnya adalah terjadi perkelahian pemuda Lingkungan Sindu Kelurahan Cakranegara Utara Kecamatan Cakranegara dengan pemuda Lingk. Kampung Lekok Kel. Mayura Kecamatan Cakranegara.
 - b. Warga kedua kampung mengalami luka ringan.
 - c. Meninggal 1 orang atas nama Sulaiman (16 tahun)
 - d. Meninggal an. I Made Ardiyana (45 tahun), 1 orang warga luka-luka serta 6 orang polisi luka-luka
 - e. Terjadi penyerangan oleh lingkungan Bagirati Kelurahan Sayang-Sayang (Islam) dengan kekuatan massa 600 orang terhadap paham Salafiyah (Sasak Islam) dengan jumlah kekuatan 50 orang.
 - f. Seorang warga Kampung Lekok Kelurahan Mayura mengalami luka terkena tombak pada jari manis kanan dan lengan kiri. 1 orang mengalami luka robek di lutut, lecet pada siku dan terkilir pundak kanan karena jatuh.

D. Konflik Horizontal di Kelurahan Cakranegara Utara Kecamatan Cakranegara.

1. Faktor-Faktor penyebab terjadinya konflik horizontal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah Cakranegara Utara, bahwa konflik horizontal terjadi berawal pada tanggal 19 Desember 2012 penyebabnya yang pertama adalah adanya kesalahpahaman antara pemuda bernama sulaiman yang sedang mengendarai motor di lapangan yang membatasi kedua kampung, ditegur oleh salah satu warga tohpati yang bernama komang, yang berujung Adu mulut sempat terjadi kemudian masing-masing pulang mengambil senjata tajam. Sulaiman pulang mengambil keris dan Komang pulang mengambil tombak. Duel keduanya terjadi di tengah sawah dekat kedua kampung, disaksikan pula pemuda dari Tohpati. Sulaiman akhirnya tewas.¹⁰ keduanya terlibat perkelahian di bawah pengaruh minuman keras. pada tanggal 7 maret 2013 adalah Warga kampung tersulut emosinya dengan saling lempar batu, warga karang mas merasa ada yang melempar rumah warganya begitu juga sebaliknya warga tohpati

¹⁰ Wawancara dengan Lurah Cakranegara Utara Ida Bagus Marta, tgl 25 september 2013, di kantor Lurah

merasa ada yang melempar rumahnya lalu berkembang jadi tawuran di seputar batas dua wilayah itu, terdapat dua orang yang menjadi korban, yaitu Adi Suparte luka luka dan Made Ardiana meninggal dunia. Lebih lanjut Lurah Cakranegara Utara mengatakan, bahwa sesungguhnya bentrok kedua ini adalah kelanjutan dari konflik yang pernah terjadi 19 Desember 2012 silam. waktu itu konflik dipicu perkelahian antarapemuda yang yang mengakibatkan Sulaiman warga Karang Mas-Mas meninggal dunia.

Proses awal terjadinya Konflik Horizontal, sebagai runtutannya yaitu : ¹¹

- a. Pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012 sekitar pukul 18.20 wita bertempat Telah terjadi perkelahian antara pemuda lingkungan Tohpati dengan pemuda lingk. Karang mas-mas Kelurahan Cakranegara Utara bertempat di diperbatasan tohpati dan karang mas-mas
- b. Adapun Karangonologis kejadian : pada awalnya ; telah terjadi keributan antara pemuda tohpati dengan pemuda karang mas-mas Cakranegara utara, awalnya salah seorang pemuda karang mas-mas An. AZIS mengendarai sepeda motonya dengan kecepatan tinggi di jalan baru lingkungan tohpati, kemudian ditegur/dicaci maki oleh pemuda atau warga tohpati karena tidak terima dengan tindakan pemuda tohpati tersebut akhirnya Sdr. AZIS kembali kekampungnya dengan tujuan untuk meminta bantuan/ memberitahukan kepada temannya. Akhirnya sempat terjadi perkelahian di Jl. Tohpati dan perkelahian tersebut sempat dilerai oleh warga sekitar lokasi. Namun ditengah-tengah di jalan Tohpati tepatnya di perbatasan tohpati dengan karang mas-mas/ areal persawahan beberapa warga karang mas-mas bertemu dengan beberapa pemuda tohpati sempat terjadi perkelahian, kedua pemuda lingkungan tersebut sempat saling kejar di tkp dan sempat terjadi perkelahian yang menimbulkan korban
- c. Tindakan Kepolisian dalam mengamankan giat tersebut yaitu :
 - a). Melakukan pengamanan secara tertutup.
 - b). Mengikuti jalannya kegiatan tersebut hingga selesai.

Kemudian Lurah, turun lapangan langsung setiap terjadi bentrok, selama saya menjabat lurah kedua peristiwa tersebut yang terparah sehingga ada korban meninggal dan luka luka, memang pernah terjadi sebelumnya yang terparah tapi itu terjadi kurang lebih 5 tahun lalu, saya mengumpulkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan untuk bentrok yang pertama warga tohpati ditangkap, diproses secara hokum karena warga karang mas mas meninggal dan bentrok kedua yang korbannya dari tohpati meninggal satu, luka luka satu, pelakunya belum ditemukan. Hasil musyawarah tersebut sudah dibuat surat kesepakatan damai antara keluarga korban dan pelaku, kesepakatan damai agar warga kedua kampung untuk tidak bertikai lagi. Kemudian Lurah juga berkoordinasi dengan pemerintah kota, pihak keamanan baik polres dan kapolda, bahkan bapak kapolda bertindak cepat dengan menurunkan personil dan turun langsung ke kedua kampung.

Biasanya konflik yang terjadi di wilayah saya karena kesalah pahaman antar pemuda, yang dipengaruhi minuman keras, kemudian adanya warga luar yang memprovokasi, saya tidak tau warga luar itu darimana untuk mengatasinya adalah diperlukannya kesadaran masing masing warga, peran keluarga dan lingkungan itu penting, marilah kita sama sama menjaga ketenangan kedamaian mulai dari lingkungan masing-masing, disinilah dibutuhkan perna tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tetap meberikan informasi tentang pentingnya toleransi dalam masyarakat yang berbeda latarbelakang.

11 Wawancara dengan Kapolsek Mataram, Muhammad Yunus, tgl 6 Agustus 2013.

Saat ini saya sedang melakukan pembangunan aula untuk pertemuan warga dimana untuk meletakkan tiang nya kami memberikan kesempatan dari perwakilan lima lingkungan/kampung, tokoh agama dan tokoh masyarakat serta tokoh pemuda untuk memasang tiang pancang dari bangunan aula tersebut. Dan ini sebagai salah satu simbol bersatunya warga kami dan mencegah terjadinya konflik di masa yang akan datang.¹²

Konflik Horizontal berkembang/terus berlangsung, yaitu: Tanggal 05 Maret 2013, masih terjadi pelemparan batu di lingkungan Tohpati dan Mas-Mas Kelurahan Cakranegara Utara Kecamatan Cakranegara Kota Mataram. Menurut Kapolsek Mataram, wawancara tanggal 19 Oktober 2013.¹³

a. Proses awal terjadinya konflik Horizontal.

1. Diinformasikan kepada kepala Lingkungan, bahwa masih terus terjadi aksi pelemparan batu/bata ke arah rumah warga baik di lingkungan Karang Mas - Mas maupun Lingkungan Tohpati Kelurahan Cakranegara Utara Kec Cakranegara Kota Mataram.
2. Setelah pasca terjadinya kasus penganiayaan terhadap salah seorang warga Lingkungan Karang. Mas – Mas a.n. SULAIMAN hingga meninggal dunia hampir setiap malam / dini hari selalu terjadi pelemparan terhadap rumah warga umat Hindu yang berdomisili di Lingkungan Karang Mas – Mas maupun Lingkungan Tohpati.
3. Pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2013 dengan rentang waktu sekitar pukul 01.00 wita s/d 05.30 wita terjadi pelemparan batu / bata ke arah rumah warga dari kedua lingkungan. Bahkan dengan intensitas yang cukup banyak / lebih sering dari hari – hari biasanya.
4. Sekitar pukul 01.50 wita, dengan adanya kejadian pelemparan batu / bata tersebut, kelompok pemuda dari Lingkungan Karang Mas – Mas a.n. MUSTA'AN bersama 6 (enam) rekannya dengan membawa senjata tajam berada di gang / perbatasan antara Lingkungan Karang Mas – Mas dengan Lingkungan Tohpati, namun setelah dilakukan himbuan oleh Kasat Intelkam AKP SAMNURDIN, SH. dan Kapolsek Cakranegara Kopol ARIEF HIDAYAT, SIK. akhirnya mereka mau pulang kembali ke rumah masing – masing.
5. Meskipun para pemuda dari Lingkungan Karang Mas-Mas mau kembali ke rumah masing – masing, namun pelemparan batu / bata tetap terjadi hingga pagi hari. Setelah dilakukan pengecekan oleh unit Intelkam yang berjaga di lokasi diperoleh hasil bahwa beberapa rumah warga yang terkena lemparan adalah sebagai berikut : Di Lingkungan Karang Mas-Mas : 1) SUHAILI, 2) AMNAH, 3) AWAL, 4) ASIP, 5) H. BAHARUDIN, Di Lingkungan Tohpati : 1. GEDE GETAS, 2. DIRGA, 3. MADE 4. SUTAMA, 5. KETUT JANE, 6. GEDE NUADA
6. SeharisepelumpelemparanrumahtersebuttepatnyapadahariSenintanggal04Maret 2013 (siang hari) akan dilakukan pemasangan lampu penerangan jalan oleh pihak Dinas Pertamanan Kota Mataram, namun pada saat akan melakukan pemasangan lampu di lokasi pertigaan depan rumah KETUT TELABAH ada salah seorang warga dari Lingkungan Karang Mas- Mas a.n. NENGAH DURMA meminta agar jangan dipasang dulu lampunya dengan alasan berdekatan dengan waktu hari raya Nyepi, dan meminta agar dipasang setelah perayaan hari raya Nyepi saja, oleh pihak

12 Wawancara dengan kepala Lingkungan Karang Mas-Mas, tgl 26 September 2013.

13 Muhammad Yunus, tanggal 19 Oktober 2013 di Mataram

dinas Pertamanan Kota Mataram hal tersebut di kabulkan, sehingga pihak Dinas Pertamanan Kota Mataram hanya memasang lampu di lokasi depan rumah Bapak SWECA yang menurut sebagian warga lingkungan. Karang Mas-Mas membuat suasana di lingkungan Karang Mas-Mas menjadi terang sedangkan di Lingkungan Tohpati masih saja gelap gulita.

b. Sebelum terjadinya konflik horizontal antar warga diawali oleh Sering terjadi pelemparan rumah dengan menggunakan batu/batu bata sebagai berikut :

1. Dengan sering terjadinya pelemparan, secara psikologis warga yang berada diperbatasan akan terus mengalami ketakutan sehingga dapat menimbulkan emosional akibat terror maupun pelemparan yang kerap terjadi apalagi saat ini sangat dekat waktunya dengan pelaksanaan perayaan hari raya Nyepi yang akan jatuh pada tanggal 12 Maret 2013.
2. Perlu dilakukan pengamanan ekstra di kedua lingkungan tersebut untuk menghindari konflik yang lebih luas terlebih menjelang pelaksanaan perayaan hari raya Nyepi tahun caka 1935 yang akan jatuh tanggal 12 Maret 2013 serta mendorong untuk segera menyelesaikan proses hukum atas kejadian tersebut sehingga pihak keluarga dari korban dan warga Lingkungan Karang Mas-Mas merasa puas dan tidak melakukan hal – hal yang bisa memprovokasi munculnya kembali kejadian konflik tersebut.
3. Peran serta Muspika setempat untuk secepatnya mengambil langkah-langkah antisipasi baik dengan memberikan pemahaman terhadap hal-hal yang sedang dilakukan oleh pihak aparat / instansi terkait maupun dengan mengundang para tokoh masyarakat kedua belah pihak untuk mencari solusi dan kesepakatan, sehingga persoalan tersebut tidak berkepanjangan dan menimbulkan persoalan baru, serta rentan terjadinya kasus SARA.

Proses kronologis terjadinya Konflik Horizontal, yang terjadi pada tanggal 14 Februari 2013.

Perkembangan situasi di Lingkungan Tohpati dan Lingkungan Karang Mas-Mas Kelurahan Cakra Utara Kecamatan Cakranegara kota Mataram, pasca terjadinya pelemparan rumah Pak BADIL pada hari Kamis tanggal 14 Februari, sekitar pukul 01.30 wita.

Upaya yang dilakukan adalah :

1. Perkembangan situasi di Lingkungan Tohpati dan Lingkungan Karang Mas-Mas Kel. Cakra Utara Cakranegara, paska terjadinya beberapa kali pelemparan rumah warga hindu yang berada diperbatasan/masuk lingkungan Karang Mas-mas Cakranegara serta Kronologisnya sebagai berikut :
 - a. Pada hari Kamis dan Jumat tanggal 14-15 Februari 2013 sekitar pukul 01.30 wita telah terjadi pelemparan yang mengenai beberapa rumah warga Hindu yang tinggal diperbatasan / berada dalam lingkungan Karang Mas-mas yaitu : Rumah Pak. BADING, DIRGA, KOMANG CANDRI, I MADE GETAS dan I WAYAN KENDOR, yang rata-rata mengenai atap rumah. Arah batu tersebut diduga berasal dari Lingkungan Karang Mas-mas Cakranegara. Pada saat terjadinya pelemparan beberapa warga Lingkungan Tohpati diperbatasan memadamkan lampu dan sekitar 20 orang warga Karang-mas-mas keluar dengan membawa berbagai senjata tajam.
 - b. Pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013, sekitar pukul 02.30 wita terjadi 2 kali lemparan bom melotov yang mengenai rumah Pak DIRGA, saat lem-

paran pertama bom melotot tersebut menyala namun pelemparan yang kedua tidak menyala. Atas peristiwa tersebut Kepala lingkungan Karang mas-mas Sdr. MURAD bersama anggota Polsek Cakranegara menghimbau dan menenangkan warga kedua belah pihak untuk kembali masuk kerumah masing-masing.

Terjadinyabeberrapakalilemparansecarasepontansekitar20KKwargaHinduyang masuk Lingkungan Karang Mas-mas menghendaki agar gang perbatasan Lingkungan Karang Mas-mas menuju Lingkungan tohpati ditutup/ditembok, dengan alasan, karena mereka merasa kurang nyaman dengan adanya teror dan pelemparan tersebut, menimbulkan keresahan masyarakat seperti :

- a. Sering terjadinya pelemparan, secara psikologis warga yang berada diperbatasan akan terus mengalami ketakutan sehingga dapat menimbulkan emosional akibat teror maupun pelemparan yang kerap terjadi dan bahkan tidak menutup kemungkinan apabila warga tersebut mengungsi dari rumahnya dalam keadaan kosong bisa terjadi pencurian dan penjarahan terhadap rumah warga yang ditinggal mengungsi.
- b. Perlu dilakukan pengamanan ekstra di kedua Lingkungan tersebut untuk menghindari konflik yang lebih luas serta perlu dilakukan upaya proses hukum atas kejadian tersebut.
- c. Perkelahian antara pemuda Lingkungan Tohpati dengan Lingkungan Karang Mas-Mas Kelurahan Cakranegara Utara Kec. Cakranegara sudah pernah terjadi yang juga dipicu oleh pemuda yang terpengaruh minuman keras sehingga perlu dilakukan himbauan kepada kedua belah pemuda dengan mengedepankan Babinkamtibmas setempat serta melakukan penertiban kepada para penjual Tuak disekitar Tempat Kejadian konflik horizontal.

Tanggal 28 Maret 2013, telah terjadi penganiayaan terhadap salah satu warga Pondok Prasi Ampenan oleh salah seorang warga dusun Tambang Helen warga lingkungan Tohpati dengan warga lingkungan Karang Mas-Mas Kelurahan Cakra Utara Kota Kota Mataram sebagai berikut :

- a. Pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 sekitar pukul 22.30 wita telah terjadi perkelahian antara warga Lingkungan Tohpati dengan warga Lingkungan Karang mas-mas Kelurahan Cakra Utara tepatnya diperbatasan lingkungan Tohpati dan lingkungan Karang Mas-mas.
- b. Kranologis kejadian yaitu perkelahian tersebut berawal dari adanya aksi pelemparan dari arah yang belum diketahui secara jelas yang mengenai atap rumah milik warga yaitu Sdr. GEDE GETAS, MADE SUTAMA dan MADE DIRGA (Ketiga orang tersebut merupakan warga Hindu yang masuk dalam Lingkungan Karang Mas-mas). Adapun beberapa rumah lain yang terkena lemparan juga yaitu rumah milik H. BAHARUDIN, SUHAELI, AMNAH, AWAL dan ASIP. Akibat kejadian tersebut warga muslim dari Lingkungan Karang Mas-mas keluar dengan membawa senjata tajam sementara warga Hindu yang berasal dari Tohpati bersiaga di tempat kejadian pelemparan tersebut yang mana warga yang perempuan serta anak-anak langsung mengungsi.
- c. Perkelahian tersebut menimbulkan yaitu An. I MADE ARDIANA Als. MADE ODAK, 45 tahun dan KETUT ARDI SUPARTHA Als. TUT DE, 37 tahun beserta beberapa warga Hindu lainnya pada saat kejadian berada di depan rumah milik MADE BUDIARTA Als. MADE GODOGAN, kemudian secara tiba-tiba terjadi saling serang dengan warga muslim dari Lingkungan Karang Mas-mas dan terjadi

perkelahian sengit yang mengakibatkan Sdr. KETUT ARDI SUPARTHA Als. TUT DE mengalami luka pada bagian dada sebelah kiri akibat terkena panah dan dinyatakan meninggal dunia di RSUP Mataram dan Sdr. I MADE ARDIANA Als. MADE ODAK mengalami luka pada tengkuk bawah telinga yang diperkirakan terkena tebasan senjata tajam.

- d. Dalam kejadian tersebut warga muslim Karang Mas-mas yang dibantu oleh warga Karang Taliwang berusaha terus menyerang dengan batu dan senjata tajam yang kemudian menyerang rumah warga Hindu yang ada di Jalan raya bahkan sempat membakar salah satu rumah milik warga An. IDA AYU KETUT MONE yang ditempati oleh Pak PUTRA dan melakukan aksi pelemparan / pengerusakan dengan menggunakan batu kearah rumah milik KOMANG SUARTA (Anggota Polsek Lingsar) serta warga Hindu lainnya.
- e. Pada saat terjadi aksi pelemparan dan penyerangan rumah milik warga yang beragama Hindu tersebut, Aparat Kepolisian kemudian merangsek masuk kearah Utara untuk memukul mundur warga yang langsung dipimpin oleh Kapolres Mataram dan sekitar pukul 01.30 wita keadaan dapat dikuasai sepenuhnya oleh Aparat Kepolisian.
- f. Dalam pengamanan perkelahian tersebut beberapa anggota Brimob dan anggota Polres Mataram menjadi korban pelemparan salah satu anggota Kepolisian An. AIPTUH. SAMSUL RIZAL (Anggota Polsek Mataram) mengalami luka pada bagian kepala akibat terkena lembaran batu dari warga.

E. Upaya Penanggulang Konflik Horizontal Yang Dilakukan.

Meliputi:

- a) Upaya perdamaian yang dilakukan terhadap Konflik yang terjadi tanggal : 23 Desember 2012, yaitu :
 1. Pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2012 pukul 16.45 wita bertempat di Masjid Darussalam lingkungan Karang mas-mas Cakranegara telah berlangsung mediasi untuk mencegah melebar nya kasus penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia an. Sdr. SULAIMAN, dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Camat Cakranegara AHSANUL KHALIK, S.Sos, Kepala lingkungan Karang Mas-mas H.ZAENUDIN, Kabag Humas Polres Mataram AKP ARIF YUSWANTO, Kapolsek Cakranegara AKP ARIF HIDAYAT, Danramil Cakranegara KAPTEN Inf. SUWARTO, Kasat Binamitra Polres Mataram AKP NURAINI serta warga Karang mas-mas sekitar 60 orang.
 2. Pertemuan tersebut diawali oleh sambutan dari Camat Cakranegara yang menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan silaturahmi, kami berharap pemuda dapat memberikan masukan apa yang menjadi keinginan warga Karang mas-mas sehingga kita semua merasa nyaman dan dapat mewujudkan kehidupan yg tentram dan saling menghargai antar masyarakat. Adapun usul yg disampaikan oleh masyarakat yg diwakili oleh FAI, MURAD, MAHSUN dan TGH BAHARUDIN antara lain :
 - a. Bahwa kami menginginkan toleransi dari lingkungan Topati dimana pada saat kami melaksanakan Ibadah Sholat Agar Tidak Memainkan Alat Music Gamelan/ gong.
 - b. Pemuda menginginkan agar penjualan miras baik yang tradisional maupun pabrikan yang diperjual belikan disekitaran lingkungan kami untuk ditertibkan.

- c. Pemuda Karang mas-mas menginginkan pelaku lainnya yang menganiaya Sdr SULAIMAN, agar segera ditangkap karena menurut informasi pelaku lebih dari satu orang.
 - d. Agar oknum yang memprovokasi pemuda karang mas-mas untuk bertikai dengan lingkungan sebelah untuk segera di tindak tegas.
3. Kemudian Terkait penangkapan tersebut Kabag Humas Polres Mataram AKP ARIF menanggapi dan menyampaikan bahwa jika masyarakat masih ada saksi yang melihat langsung kejadian tersebut untuk melengkapi kasus tersebut kami akan periksa dan jika terbukti ada pelaku lain kami Pihak Kepolisian akan mengambil dan menangkap langsung pelaku tersebut, diharapkan juga masyarakat bersama-sama dapat mengawal kasus tersebut sampai selesai, kemudian untuk masalah minuman keras kami Pihak kepolisian tetap berkomitmen untuk memberantas miras tersebut, pihak Kepolisian juga telah bekerja sama dengan pemerintah melakukan penertiban dan menyita beberapa miras yang beredar di Kota Mataram. Setelah mendengar tanggapan dari pihak Aparatur Pemerintahan warga merasa puas dan siap berdamai namun warga akan merapatkannya terlebih dahulu bersama warga lainnya untuk menunjuk perwakilan, serta warga akan terus mengawal kasus yang menyebabkan Sdr. SULAIMAN meninggal dunia, kemudian atas nama pemerintah Camat beserta pihak Kepolisian dan TNI mengucapkan terimakasih jika ada kekurangan atau kelemahan atas pelayanan kami selama 5 hari ini dan kami memohon maaf. Mediasi berakhir pada pukul 17.30 wita berjalan dengan aman dan lancar.
 4. Kemudian pukul 20.00 wita bertempat di Masjid Darussalam Lingkungan Karang Mas-Mas Kelurahan Cakra Utara Kecamatan Cakranegara Kota Mataram telah berlangsung Tahlilan untuk almarhum SULAIMAN dan H. MURDAH yang dihadiri sekitar 150 orang. Selesai Tahlilan acara dilanjutkan dengan musyawarah warga Lingkungan Karang Mas-mas untuk membahas masalah keamanan dan solusi pasca bentrok dengan warga Lingkungan Tohpati. Musyawarah dipimpin oleh Sdr. MAKSUN dan dihadiri Kepala lingkungan Karang Mas-Mas, Babinkamtibmas serta Babinsa.
 5. Dalam musyawarah tersebut meminta persetujuan warga atas undangan Camat Cakranegara (sebagai fasilitator) untuk 20 orang perwakilan dari Karang Mas-Mas dalam rangka menghadiri pertemuan dengan warga Tohpati untuk proses rekonsiliasi. Dari Sdr. MAKSUN menawarkan upaya perdamaian dengan warga Tohpati, tanpa menghentikan proses hukum agar berlangsung / berjalan. Kemudian salah satu warga An. MURAD mengusulkan agar masalah perdamaian dibicarakan pasca nyiwak (pasca sembilan hari tahlilan almarhum), namun dari beberapa kalangan pemuda dan AMAQ SAIRI (bapak almarhum SULAIMAN) tetap bersikeras tidak menginginkan adanya perdamaian dengan warga Tohpati.
 6. Karena tidak ada titik temu/solusi akhirnya musyawarah bubar pada pukul 21.00 wita berjalan aman dan lancar.

Setelah pertemuan itu gagal kemudian diadakan lagi pertemuan terbatas antar tokoh dari kedua dusun dengan pemerintah dan aparat kepolisian agar melakukan mediasi, yaitu :

Dengan adanya mediasi dan pertemuan yang telah dilakukan menggambarkan emosi warga mulai mereda meskipun mediasi dilakukan secara sepihak tanpa kedua belah pihak dipertemukan sehingga perlu dilakukan pendekatan lebih dalam terhadap tokoh pemuda Karang Mas-Mas secara berkesinambungan untuk kedepan

*dapat mempertemukan kedua belah pihak guna mencari solusi permasalahan yang dihadapi, bahwa sebagian warga belum memahami dengan kata damai yang ditawarkan dari pihak pemerintahan maupun kepolisian yang mana masyarakat men-
gantikan kata damai tersebut untuk proses hukum bagi pelaku tidak dilanjutkan. Perlu dilakukannya penjelasan/memberikan himbauan kepada warga mengenai proses perdamaian yang ditawarkan sehingga warga tidak menyalah artikan yang dapat menyebabkan emosi warga kembali meningkat.*

b) Pertemuan antara beberapa warga dari lingkungan Karang mas-mas dengan warga lingkungan tohpati kelurahan cakar utara kecamatan cakranegara kota mataram.

1. Upaya penangulung/penyelesain konflik horizontal tahap pertama

Pada Minggu tanggal 14 April 2013 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Bale Sangkep Universitas 45 Mataram, Jalan Imam Bonjol Cakranegara, telah berlangsung pertemuan antara beberapa warga lingkungan Karang mas-mas dengan perwakilan wargalingkungan Tohpati Kelurahan Cakra Utara Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.

a. Pertemuan tersebut dihadiri oleh :

- Camat Cakranegara Dr.SALMAN RUSDI
- Rektor univ 45 Drs. H.M.SABIDIN RIFAINI
- Lurah Cakra utara IDA BAGUS NYM ARTHA
- Kapolsek Cakranegara Kompol ARIEF HIDAYAT,SIK
- Kasat Binmas Polres Mataram AKP NURHAENI
- Danramil Cakranegara Kapten MARITO,
- Kepala lingkungan Tohpati IDA BAGUS WELKEN
- Kepala lingkungan Karang Mas-mas M.MURAD
- IWAYANSRIMASNA (orang tua MADEODAK) bersama dua orang warganya.
- AMAQ SAHIRI (orang tua almh. SULAEMAN) bersama 12 warga Karang Mas-mas

b. Pertemuan tersebut diawali dengan bersalaman dan sama - sama menyampaikan permohonan maaf antara AMAQ SAHIRI dengan I WYN SRI MASNA. Selanjutnya pertemuan dilanjutkan dengan difasilitasi / dipandu oleh Dekan Universitas 45 Drs. MISBAH dan menjelaskan bahwa Draf perdamaian yang telah disepakati akan dilaporkan terlebih dahulu kepada Walikota Mataram, untuk kemudian pada saat penandatanganan oleh kedua belah pihak, akan mengundang Muspika dan Walikota Mataram untuk menyaksikan penandatanganan perdamaian tertulis tersebut, dalam waktu yang akan ditentukan kemudian.

2. Upaya penangulung tahap ke dua :

a. Pertemuan antar warga Karang Mas-mas dengan warga Tohpati dilaksanakan dikarenakan sebelumnya telah terjadi bentrok antar warga kedua belah pihak beberapa waktu yang lalu yang mengakibatkan jatuhnya korban meninggal dunia dari kedua belah pihak.

b. Perlu dilakukan monitoring tentang isu yang berkembang di antara warga Karang Mas – mas dan warga lingkungan Tohpati untuk mengetahui dan meminimalisir segala kemungkinan adanya provokasi yang dapat mengakibatkan terjadinya dan terulangnya bentrok diantara kedua belah pihak.

Penepatan aparat kepolisian sebagai upaya presuasif. Adapun kekuatan personil

yang melakukan pengamanan dalam pertikaian warga tersebut yaitu :

- a. 100 Personil Polres Mataram
 - b. 11 Personil Dalmas Polres Lobar
 - c. 41 Personil Brimob Loteng
 - d. 25 Personil Brimob Lotim
 - e. 65 Personil Dalmas Polda
 - f. 10 Personil Gasum
 - g. 53 Personil Sat Brimobda Polda NTB
 - h. 69 Personil Yon 742/SWB
- c. Ada isu yang berkembang atas terjadinya beberapa kali pelemparan, bahwa sekitar 20 KK warga hindu yang masuk Lingkungan Karang Mas-mas menghendaki agar gangperbatasan Lingkungan Karang Mas-mas menuju Lingkungan Tohpati ditutup/ditembok, dengan alasan karena mereka merasa kurang nyaman dengan adanya teror dan pelemparan tersebut. Warga juga berencana akan melakukan rapat apabila tetap terjadi teror dan pelemparan serta akan menyampaikan peristiwa tersebut kepada Lurah Cakra Utara untuk dapat ditindak lanjuti.
- d. Pada hari Jumattanggal 8 Maret 2013 pukul 09.30 witabertempat di kantor Kelurahan Cakra Barat telah diadakan pertemuan 9 (Sembilan) kepala Lingkungan untuk membahas kejadian perkelahian antara Lingkungan Karang Mas-Mas dengan Lingkungan Tohpati. Pertemuan tersebut dipimpin oleh ketua Forum Kepala lingkungan an. I GEDE WARGA, adapun Kepala lingkungan yang hadir dalam acara tersebut : Lingkungan Karang Jangkong, Lingkungan Panaraga, Lingkungan Karang Kemong, Lingkungan Banjar Pande Utara, Lingkungan Karang Sampalan, Lingkungan Jeruk manis, Lingkungan Giri Menara, Lingkungan Karang Kauhan, dan Lingkungan Kampung Jawa. Dari rapat tersebut telah disepakati sebagai berikut:
- a. Agar warga masyarakat tidak mudah terprovokasi dan mendengarkan isu – isu yang menyesatkan.
 - b. Agar masyarakat tidak mudah terpecah belah, sehingga kejadian tersebut tidak meluas.
 - c. Setiap Kepala lingkungan diminta untuk menghimbau warga, pemuda, Toga dan Toma yang intinya meminta masyarakat Cakra Barat yang majemuk tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang beredar.

Upaya penyelesaian konflik horizontal tersebut di atas sesuai dengan pendapat Peter Lovenheim, dalam Prija Jatmika,¹⁴ bahwa mediasi adalah proses dan sebagai proses, ia dapat digunakan untuk hampir seluruh jenis persengketaan (konflik komunal). Mediasi bekerja sangat baik, sebab mediasi memandang ke masa depan, bukan kemasa lalu. Hukum memandang kebelakang untuk menuntukan siapa yang benar dan siapa yang salah mediasi memandang kedepan untuk menemukan suatu solusi dimana para pihak dapat menyesuaikan diri. Di dalam hukum, pengadilan menggunakan kekuasaannya untuk memerintahkan suatu keputusan; sedangkan di dalam mediasi, pihak yang bersengketa memberikan kewenangan kepada dirinya sendiri untuk menemukan solusinya sendiri oleh karena itu sekalipun ada berbagai bentuk mediasi sebagai mana disebutkan sebelumnya, tetapi yang sejalan dengan cara penyelesaian

¹⁴ Prija Djatmika, *Penyelesaian Perkara Penghinaan Dengan Sarana Pers*, (Malang : Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2008), hlm 95.

konflik horizontal di Cakra Utara kecamatan Cakranegara Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah model mediasi “*community panels or courts*”. Model ini merupakan perogram untuk membelokan tindak pidana dari penuntutan atau peradilan pada perosedur masyarakat yang lebih feleksibel dan informal dan sering melibatkan unsur mediasi atau negosiasi.”*Traditional village or tribal moots*”. Menurut model ini, seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik di antara warganya. Model ini ada di beberapa negara yang kurang maju dan di wilayah pedesaan/ pedalaman, termasuk di dalamnya daerah terpencil. Senada dengan perkembangan tersebut, Idrus Abdullah, mengatakan bahwa :

*“Penyelesaian sengketa merupakan salah satu aspek hukum penting yang diperlukan manusia untuk mencapai ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat, hal ini menyebabkan berkembangnya berbagai pranata hukum, kebiasaan-kebiasaan, atau tradisi mekanisme penyelesaian sengketa dalam praktek budaya masyarakat, baik di negara berkembang, maupun di negara-negara maju”*¹⁵

Berdasarkan pertimbangan telah dan sering terjadinya beberapa konflik komunal yang cenderung mengarah kepada konflik SARA (Suku Agama dan Ras) yang terjadi akhir-akhir ini, perlu dilakukan pemantauan dan pengawasan perkembangan situasi oleh pemerintah dan aparat keamanan serta TNI, khususnya di Lingkungan Karang Mas-mas dengan Tohpati, Kelurahan Cakra Utara Kota Mataram, yang mana kedua lingkungan tersebut hingga saat ini belum adanya kesepakatan dan masih terjadinya aksi teror yang dilakukan oleh oknum pemuda yang tidak bertanggungjawab.

1. Hasil penelitian yang diperoleh dari beberapa sumber disekitar Lingkungan Karang Mas-mas dan Tohpati, Kelurahan Cakra Utara Kota Mataram dan perkembangan situasi pasca terjadinya beberapa kali pelemparan terhadap beberapa rumah warga Hindu sebagai berikut :¹⁶
 - a. Beberapa pemuda Karang Mas-mas menanyakan kepada Kepala Lingkungan Karang Mas-mas M. MURAT terkait rekan pelaku yang dicurigai ikut melakukan pembunuhan sampai saat ini mengapa belum ditangkap seperti : TUKDE dan WYN PANJATI serta MD. ODAK (kakak pelaku) walaupun pada saat kejadian tidak turut langsung menganiaya korban, namun beberapa orang tersebut dianggap selalu membuat masalah / pemicu permasalahan kedua belah Lingkungan.
 - b. Warga yang sering didatangi oleh aparat Kepolisian yang bertugas di Karang Mas-mas, termasuk Kepala lingkungan selalu dicurigai oleh oknum pemuda yang menghendaki adanya keributan, karena dianggap sebagai mata-mata.
 - c. Sejauh ini Issue yang sering dihembuskan oleh oknum pemuda Karang Mas-mas bahwa warga Tohpati dilihat berkumpul dan bersiaga diperbatasan memakai pakaian warna hitam-hitam dan membawa senjata tajam, sehingga pemuda Karang Mas-mas keluar untuk mengantisipasi adanya serangan, setelah dilakukan pengecekan terhadap isue tersebut oleh Kepala lingkungan bersama beberapa pemuda Karangmas-mas langsung ke Lingkungan Tohpati ternyata isue tersebut tidak benar.
 - d. Adanya salah seorang warga an. M.EDY yang tinggal dilingkungan Karang Mas-mas, latar belakang yang bersangkutan adalah warga hindu (orang tua MD ROMPONG, alamat Tohpati), menikah dengan warga muslim dari Kab. Lotim dan ikut agama istrinya/islam, saat ini M.EDY dicurigai sebagai mata-matanya orang-orang Tohpati,

¹⁵ Idrus Abdullah, *Penyelesaian Sengketa Melalui Mekanisme Pranata Lokal*, (Yogyakarta : P Idea Kelompok Pilar Media, 2008). Hlm.1.

¹⁶ Wawancara dengan Kepala Lingkungan Karang Mas-Mas dan Tohpati, tgl 26-27 Oktober 2013

- karena merasa terancam, sehingga memilih tinggal diluar yaitu di Posko Amphibi Bertais untuk menghindari hal-hal yang dapat mengancam keselamatan keluarga.
- e. Kepala Lingkungan Ida Bagus Welken menerangkan bahwa sekitar 3 Minggu yang lalu yaitu pada pukul 03.00 wita pada saat pulang dari Posko Amphibi dan melintas dipertigaan jalan menuju Tohpati, melihat pemuda melompat dari tembok rumah MangkuSUWECA yang sudah terbakar kemudian menegur pemuda tersebut kenapa naik lagi tembok rumah sudah rusak dan warga di Selatan tidak ada apa-apa dan aman-aman saja. Pemuda Karang Mas-mas an. JOI (Yang baru bebas dari LP kasus pemerkosaan) mengatakan bapak tidak tahu kita ini setiap malam begadang jaga-jaga, dijawab oleh M. EDY siapa suruh jaga sudah aman dan tidak ada apa-apa, pada saat itu pula keluar H.ARSAD, PNS PU Lobar, alamat Karang Mas-mas dan mengatakan siapa melarang jaga disini.
 - f. Diketahui pula bahwa H. ARSAD pernah menyampaikan kepada Kepala lingkungan Karang Mas-mas M.MURAT bahwa pernah mengasi uang untuk membeli minuman dan makan kepada pemuda yang berjaga-jaga.
 - g. Adanya kecurigaan terhadap H.ARSAD karena perilakunya lain sebelum ada peristiwa perkelahian antara pemuda Karang Mas-mas dengan Tohpati, M.EDY dengan H.ARSAD bertetangga baik dan biasa lewat di Lingkungan Tohpati dan bahkan pernah diajak oleh Kepala lingkungan untuk sama-sama memantau situasi warga Tohpati akan tetapi tidak mau.
2. Hasil wawancara dengan wargaan. GDGETAS, alamat Karang Mas-mas sebagai berikut:¹⁷
- a. Di Pasar Cakranegara, telah beredar isu yang diduga disampaikan oleh oknum warga Karang Mas-mas terhadap umat muslim, bahwa pada saat perayaan nyepi yaitu pada tanggal 12 Maret 2013, yang mana umat Hindu pada malam hari akan mematikan lampu dan pada saat tersebut akan ada gejolak.
 - b. Warga Hindu Lingkungan Karang Mas-mas, tetap menghendaki agar akses jalan menuju Tohpati ditembok dengang alasan untuk keamanan dan warga tersebut telah menyampaikan secara lisan kepada Lurah Cakranegara, tetapi sampai saat ini belum ada tanggapan, sehingga warga berencana akan melakukan pertemuan dan bersurat.
 - c. Seringnya terjadi pelemparan yang mengenai beberapa rumah warga Hindu yang tinggal di perbatasan Lingkungan Karang Mas-mas yaitu: Rumah Pak. BADING, DIRGA, KOMANG CANDRI, I MADE GETAS dan I WAYAN KENDOR, yang rata – rata mengenai atap rumah, arah batu diduga berasal dari arah Lingkungan Karang Mas-mas Cakranegara yang rata – rata terjadi pada dini hari sekitar pukul 01.00s/d03.00 wita, dengan kejadian tersebut membuat beberapa warga Lingkungan Tohpati memadamkan lampu.

Usulan Upaya yang dilakukan pemerintah menurut dua kepala lingkungan sebagai berikut:

1. Peristiwa teror dan pelemparan yang akhir-akhir ini kerap terjadi dimungkinkan karena hingga saat ini belum adanya kesepakatan damai dan beberapa warga yang rumahnya dirusak merasa kecewa karena belum adanya perbaikan dari pemerintah terkait, sehingga bisa membuat suasana kembali ribut dengan cara mereka yang susah terdeteksi.

17 Wawancara, tanggal 26 Oktober 2013 di lingkungan Karang Mas-Mas.

2. Warga / pemuda Karang Mas-mas masih terbawa emosi / dendam dan belum bisa melupakan tragedi pembunuhan yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa an SULAIMAN (Pemuda Karang Mas-mas), apalagi pelakunya orang bali dan tidak yakin bahwa korban dibunuh oleh satu orang tersangka. Beberapa warga/pemuda Karang Mas-mas sewaktu-waktu dengan melihat situasi akan tetap melakukan hal-hal atau upaya provokasi yang dapat mengganggu kenyamanan dan ketertiban warga hindu KarangMas-mas dan LingkunganTohpati, seperti melakukan pelemparan, mematikan lampu dan bersiaga atau berjaga-jaga. Hal itu akan tetap dilakukan selama pelaku yang lain belum ditangkap.
3. Selama belum adanya langkah-langkah untuk mencari solusi terbaik demi terciptanya kedamaian yang dilakukan oleh unsur pemerintah baik tingkat kecamatan dan Kota Matarammaupununsurpimpinan/instansiterkaitterhadapapayangmenjadi persoalan yang muncul saat ini diLingk. KarangMas-mas, perkembangan situasi Kamtibmas sewaktu-waktu akan tetap akan tetap dapat bergejolak terlebih secara psikologis warga kedua belah pihak merasa belum nyaman dan saling masih saling mencurigai, yang nantinya akan dapat memicu terjadinya provokasi oleh oknum warga yang tidak bertanggungjawab.
4. Hingga saat ini belum adanya perbaikan terhadap kerusakan rumah dan tempat Ibadah warga Hindu yang ada di perbatasan Karang Mas-mas dan Tohpati dari pihak Pemerintah Kota Mataram, tidak menutup kemungkinan pihak warga Umat Hindu akan melakukan gerakan dan tindakan untuk membalas kerusakan yang dilakukan oleh pihak Lingkungan Karang Mas-mas.

Analisis kejadian, Menyikapi beberapa hal tersebut di atas, setiap peristiwa sekecil apapun akan dijadikan alasan oleh warga Lingkungan Karang Mas-mas (Warga Muslim) untuk melakukan aksi provokasi balasan terhadap jatuhnya korban jiwa dari Lingkungan Karang Mas-mas (Muslim) terhadap warga Lingkungan Karang Mas-mas (Hindu) dan Lingkungan Tohpati terutama pada 3 (Tiga) orang yang diduga ikut menjadi pelaku penganiayaan sdr. SULAIMAN hingga meninggal dunia.

Saat ini Warga di Lingkungan Karang Mas-mas terkesan tertutup dan memilih menjauh dengan aparat Kepolisian yang sedang melaksanakan tugas, dengan alasan takut apabila dilihat oleh oknum pemuda dan akan dicurigai sebagai mata-mata dan dimusuhi oleh oknum warga, sehingga Upaya penanggulangan yang dilakukan :

- a) Pendekatan dengan tokoh pemuda dan tokoh masyarakat yang disegani di kedua Lingkungan bertikai untuk ikut serta menghimbau warganya agar tidak mudah terprovokasi dengan hal-hal maupun issue-issue yang belum jelas kebenarannya serta lebih mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan.
- b) Perlunya dilakukan intervensi sosial khususnya pada masyarakat yang rawan konflik SARA melalui tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama juga dengan memanfaatkan media informasi dan telekomunikasi yang ada.
- c) Intelijen dan Babin Kamtibmas agar selalu meningkatkan kewaspadaan untuk mendeteksi dini adanya kelompok tertentu yang memanfaatkan situasi dengan menyebarkan isu yang sesat dan menghasut masyarakat untuk melakukan tindakan anarkis.
- d) Mengingat pada tanggal 12 Maret 2013 warga Hindu akan merayakan Hari Raya Nyepi yang dimana dalam kegiatan tersebut akan mematikan lampu, sehingga perlu kiranya untuk melakukan peningkatan pengamanan dalam mengantisipasi terjadinya gejolak

pada saat terhadap warga Hindu yang ada di perbatasan Karang Mas-mas maupun di Lingkungan Karang Mas-mas.

SIMPULAN

Nusa Tenggara Barat merupakan daerah rawan terhadap berbagai bencana, baik disebabkan oleh alam maupun manusia. Berbagai konflik sosial yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Konflik dapat dipahami dari beberapa gejala antara lain. Konflik bisa terjadi pada setiap orang, dimana saja dan kapan saja. Terjadinya mulai dari yang ringan dan tersembunyi hingga tingkat terparah yang pada intinya nanti semua pihak bersepakat ungu penyelesaian konflik yang terjadi sehingga tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Pemerintah harus terus melakukan pembinaan kepada masyarakat, khusus generasi muda untuk bisa hidup rukun damai dalam pluralism/perbedaan melalui penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah perlu meningkatkan perekonomian masyarakat untuk mengurangi pengangguran, sehingga mengurangi konflik horizontal dalam masyarakat. Aparat penegak hukum tanggap terhadap isu yang berkembang dalam masyarakat untuk segera diantisipasi secara dini bersama tokoh masyarakat dan tokoh pemuda sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Agar warga masyarakat tidak mudah terprovokasi dan mendengarkan isu – isu yang menyesatkan, masyarakat tidak mudah terpecah belah, sehingga kejadian tersebut tidak meluas. Setiap kepala lingkungan diminta untuk menghimbau warga, pemuda, Toga dan Toma yang intinya meminta masyarakat Cakra Barat dan Cakra Utara yang majemuk tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang beredar.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai, Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung : Citra Aditya Bakti, Bakti).
- Hugo van der Merwe, 2001, *Conflict Theories*, Johannesburg, Afrika Selatan, 1997 dan dalam sebuah makalah Marck Roos, *Creating The Conditions For Peace Making: Theories of Practice in Ethnic Conflict Resolution*, Ethnic and Racial Studies, 2000. dalam Simon Fisher, *Mengelola Konflik Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*. (Jakarta: Penerbit The British Council).
- Idrus Abdullah, 2008, *Penyelesaian Sengketa Melalui Mekanisme Pranata Lokal*, (Yogyakarta : P Idea Kelompok Pilar Media).
- Lihat Simon Fisher, dkk. 2001, *Mengelola Konflik Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*, (Jakarta : British Council Indonesia).
- Maswadi Rauf, 2000, *Konsensus Politik: Sebuah Penajagan Teoritis*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional).
- Prija Djatmika, 2008, *Penyelesaian Perkara Penghinaan Dengan Sarana Pers*, (Malang : Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya).
- Pringondigdo, A.G, (Red), 1961, *Ensiklopedia Umum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1973), hlm. 687. Lihat juga, Poerwodarminto, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*,

(Jakarta: Balai Pustaka).

Wawancara dengan Kapolsek Mataram, Muhammad Yunus, tgl 6 Agustus 2013.

Wawancara dengan Kepala Lingkungan Karang Mas-Mas dan Tohpati, tgl 26-27 Oktober 2013

Wawancara dengan Muhammad Yunus, tanggal 19 Oktober 2013 di Mataram

Wawancara dengan kepala Lingkungan Karang Mas-Mas, tgl 26 September 2013.

Wawancara dengan Lurah Cakranegara Utara Ida Bagus Marta, tgl 25 september 2013, di kantor Lurah

Wawancara, tanggal 26 Oktober 2013 di lingkungan Karang Mas-Mas.

Yayasan Cipta Loka, *Ensiklopedia Populer Politik Pembangunan Pancasila*, (Jakarta: Yayasan Cipta Loka, 1984) hlm.63.